

EVALUASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH *REUSE REDUCE RECYCLE* DI KABUPATEN MOJOKERTO

Adhe Prayoga Setyo Adji

NPP. 32.0498

Asdaf Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: adheprayoga30@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Andi Pitono, S.Sos, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Waste is an environmental issue that continues to increase with population growth and economic activity. Mojokerto district faces serious challenges due to the overcapacity of Karangdiyeng landfill, while conventional management is no longer considered effective. Sustainable strategies are needed, one of which is through the Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) Waste Processing Station. **Purpose:** his study aims to evaluate the policy of implementing TPS 3R in Mojokerto district and identify the factors that hinder it. **Method:** The method used is descriptive qualitative with a policy study approach based on William N. Dunn's evaluation theory, including six criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. Data were obtained through observation, interviews, documentation, and triangulation. **Result:** The results showed that the implementation of TPS 3R in Mojokerto district has not been optimal. There is an imbalance between the number of TPS 3R and the number of villages, limited facilities and infrastructure, low community participation, and limited budget allocation. The main obstacles identified include the lack of competent human resources, low public awareness of 3R-based waste management, and weak regulations and coordination between related agencies. **Conclusion:** The conclusion of this study is the need to strengthen institutional capacity, increase education and socialization to the community, and expand and strengthen the role of TPS 3R as an effort to realize a sustainable waste management system in Mojokerto district.

Keywords: Public Policy, Waste Management, Evaluation, Mojokerto District

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Sampah merupakan persoalan lingkungan yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Kabupaten Mojokerto menghadapi tantangan serius akibat kelebihan kapasitas TPA Karangdiyeng, sementara pengelolaan konvensional dinilai tidak lagi efektif. Strategi berkelanjutan diperlukan, salah satunya melalui Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R). **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan penyelenggaraan TPS 3R di Kabupaten Mojokerto dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. **Metode:** Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kebijakan berdasarkan teori evaluasi William N. Dunn, meliputi enam kriteria: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi TPS 3R di Kabupaten Mojokerto belum berjalan optimal. Terdapat ketimpangan antara jumlah TPS 3R dan jumlah desa/kelurahan, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan alokasi anggaran. Hambatan utama yang diidentifikasi antara lain adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah berbasis 3R, serta lemahnya regulasi dan

koordinasi antarinstansi terkait. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta perluasan dan penguatan peran TPS 3R sebagai upaya mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kabupaten Mojokerto.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Pengelolaan Sampah, Evaluasi, Kabupaten Mojokerto

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan sampah menjadi salah satu isu lingkungan yang semakin mendesak di tengah pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, dan perkembangan industri. Di berbagai daerah, sampah sering kali masih ditangani dengan cara konvensional seperti pembakaran terbuka atau penimbunan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia (Wilson *et al.*, 2012). Seiring meningkatnya timbulan sampah, pendekatan pengelolaan yang tidak berkelanjutan ini semakin memperburuk kualitas lingkungan hidup.

Menurut Hoornweg & Bhada-Tata (2012), akumulasi sampah yang tidak terkelola dapat menimbulkan beban biaya besar untuk pembersihan, pengolahan, dan pemulihan dampak lingkungan. Dalam konteks ini, Kabupaten Mojokerto menghadapi tantangan serius, terutama dengan kondisi TPA Karangdiyeng yang mengalami kelebihan kapasitas (*overload*). Dengan populasi lebih dari satu juta jiwa dan potensi timbulan sampah yang tinggi, kapasitas TPA yang terbatas menjadi persoalan krusial yang memerlukan perhatian segera.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 telah mengarahkan upaya pengelolaan sampah berbasis lingkungan dengan mendorong pelaksanaan TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Pendekatan ini tidak hanya bertujuan mengurangi volume sampah, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah berkelanjutan. Prinsip 3R dianggap sebagai langkah strategis dalam meminimalisasi beban TPA dan meningkatkan pemanfaatan ulang material sampah yang masih bernilai. Hal ini sejalan dengan temuan Hidayat dan Prasetyo (2021) yang menunjukkan bahwa implementasi TPS 3R yang efektif mampu mengurangi tekanan pada TPA sekaligus membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber.

Namun, implementasi TPS 3R di Kabupaten Mojokerto belum menunjukkan hasil optimal. Dari 299 desa dan 5 kelurahan, hanya terdapat 29 lokasi TPS 3R yang aktif, sehingga menunjukkan kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Selain keterbatasan jumlah dan distribusi fasilitas, kendala lain yang turut berkontribusi adalah kurangnya kesadaran masyarakat, terbatasnya sarana prasarana, serta minimnya koordinasi dan regulasi pendukung.

Paralel dengan kondisi tersebut, sejumlah studi internasional menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang adaptif dan sistematis dalam pengelolaan sampah di negara berkembang. Zaman & Ahsan (2019) menyatakan bahwa pengelolaan sampah yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada teknologi atau infrastruktur, tetapi juga pada keberadaan kerangka kebijakan yang jelas dan dukungan institusional yang memadai. Ferronato & Torretta (2019) juga menekankan bahwa banyak negara berkembang menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah akibat minimnya fasilitas 3R dan lemahnya pengawasan, yang sering berujung pada praktik pembuangan sampah yang tidak ramah lingkungan. Di sisi lain, keberhasilan implementasi prinsip 3R sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat. Studi oleh Ahmed *et al.* (2021) menunjukkan bahwa partisipasi publik yang kuat dalam praktik pemilahan dan pengurangan sampah di tingkat rumah tangga

merupakan kunci dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang tangguh dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penting dilakukan evaluasi terhadap kebijakan penyelenggaraan TPS 3R di Kabupaten Mojokerto. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan, serta mengidentifikasi hambatan yang mengganggu optimalisasi pengelolaan sampah berbasis 3R. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi landasan perbaikan kebijakan dan penguatan kelembagaan guna menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih tangguh dan partisipatif di masa depan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada ketidaksesuaian antara kebijakan penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R) dengan implementasinya di lapangan. Berdasarkan identifikasi awal, Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan volume sampah yang signifikan, sementara TPA Karangdiyeng sebagai satu-satunya tempat pembuangan akhir telah mengalami kelebihan kapasitas. Dalam situasi ini, TPS 3R seharusnya menjadi solusi strategis untuk mengurangi beban TPA. Namun, jumlah TPS 3R yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah desa dan kelurahan, serta masih terdapat berbagai hambatan seperti keterbatasan sarana prasarana, minimnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya koordinasi antarinstansi.

Penelitian ini berangkat dari dua rumusan masalah utama, yaitu bagaimana evaluasi kebijakan penyelenggaraan TPS 3R di Kabupaten Mojokerto, serta apa saja faktor penghambat yang menyebabkan pelaksanaannya belum berjalan optimal. Kedua rumusan ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang cukup jelas antara tujuan ideal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, dengan realitas implementasi di lapangan yang menunjukkan berbagai keterbatasan dan ketidaksesuaian dalam praktiknya.

Kesenjangan penelitian ini diperkuat dengan tinjauan literatur sebelumnya yang menunjukkan bahwa mayoritas penelitian mengenai TPS 3R hanya berfokus pada aspek teknis pelaksanaan atau analisis risiko, seperti yang dilakukan oleh Norken dkk. (2021) di Kota Denpasar atau Kania & Lely (2020) di Kabupaten Bandung. Belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengevaluasi kebijakan TPS 3R dengan menggunakan teori evaluasi William N. Dunn, khususnya dalam konteks wilayah Kabupaten Mojokerto.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi strategis dalam mengisi kekosongan kajian evaluatif yang menitikberatkan pada kriteria kebijakan publik secara menyeluruh, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai penyebab ketidakefektifan pelaksanaan TPS 3R dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah.

Melalui pemetaan kesenjangan antara kebijakan dan implementasi, serta keterbatasan penelitian sebelumnya, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis terhadap penguatan pengelolaan sampah berbasis 3R di tingkat daerah, khususnya dalam kerangka kebijakan publik yang berorientasi pada keberlanjutan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam studi ini umumnya membahas pelaksanaan dan tantangan pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R dalam berbagai konteks daerah. Kaniya & Lely (2020) mengkaji faktor-faktor penyebab tidak optimalnya TPS 3R di Desa Pasawahan, Kabupaten Bandung. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya kapasitas

sumber daya manusia, kurangnya partisipasi masyarakat, serta ketidaksesuaian lokasi TPS menjadi hambatan utama implementasi.

Penelitian lain oleh Norkend dkk. (2021) berfokus pada analisis risiko pembangunan dan pengelolaan TPS 3R di Desa Sanur Kauh, Kota Denpasar. Pendekatan semi-kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi risiko teknis dan sosial, dengan temuan utama perlunya mitigasi melalui sosialisasi berkelanjutan, penguatan regulasi, serta koordinasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini menekankan pentingnya aspek kelembagaan, namun tidak secara langsung mengevaluasi kinerja kebijakan.

Sementara itu, Purba & Wahyuni (2020) mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Kalikondang, Kabupaten Demak. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengungkap bahwa kebijakan belum mencapai efektivitas optimal, karena lemahnya pelaksanaan dan belum tersedianya sistem evaluasi yang komprehensif. Penelitian ini penting sebagai referensi karena menyoroti aspek kebijakan, meskipun belum mengkaji TPS 3R secara spesifik.

Penelitian oleh Situmeang, Santoso, dan Warsono menyoroti evaluasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis bank sampah di Kelurahan Tinjomoyo, Kota Semarang. Dengan pendekatan kualitatif, mereka menemukan bahwa dukungan SDM, anggaran, dan infrastruktur telah cukup baik, namun fokus penelitian ini lebih sempit, terbatas pada satuan pengelolaan mikro, bukan sistem TPS 3R sebagai bagian dari kebijakan daerah.

Utami & Putra (202) meneliti kebijakan pengelolaan sampah di TPA Kabupaten Bantul. Meskipun menggunakan pendekatan kualitatif yang serupa, penelitian ini menekankan bahwa berbagai aspek evaluasi kebijakan seperti efektivitas, efisiensi, ketepatan, dan responsivitas belum terpenuhi secara maksimal. Namun demikian, studi ini belum mengintegrasikan pendekatan evaluasi kebijakan secara teoritis yang utuh seperti model William N. Dunn.

Dari lima penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kajian lebih menitikberatkan pada aspek pelaksanaan teknis dan tantangan operasional pengelolaan sampah atau bank sampah, tanpa menelaah evaluasi kebijakan secara menyeluruh dalam konteks TPS 3R. Belum terdapat penelitian yang secara khusus mengevaluasi kebijakan penyelenggaraan TPS 3R di Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan enam kriteria evaluasi dari William N. Dunn. Di sinilah letak kebaruan dari penelitian ini, yaitu memberikan analisis mendalam terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R dengan pendekatan evaluasi kebijakan publik secara sistematis dan menyeluruh, guna menjawab kesenjangan antara kebijakan normatif dan realitas implementatif di tingkat daerah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dalam kajian evaluasi kebijakan penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R) di Kabupaten Mojokerto. Hingga saat ini, belum terdapat penelitian terdahulu yang secara komprehensif mengevaluasi kebijakan TPS 3R di wilayah ini dengan menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan publik berdasarkan enam kriteria dari William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Sebagian besar penelitian sebelumnya, seperti Kania & Lely (2020) serta Norken dkk. (2021), hanya membahas hambatan teknis pelaksanaan TPS 3R atau analisis risiko pembangunan, tanpa memosisikannya dalam kerangka evaluasi kebijakan yang sistematis. Sementara itu, penelitian oleh Purba & Wahyuni (2020), Situmeang dkk. (2023), dan Utami & Putra (2022) memang mengangkat aspek evaluatif, tetapi fokus lokusnya berbeda, serta tidak secara eksplisit membedah dimensi evaluasi kebijakan berdasarkan teori evaluasi William N. Dunn.

Berbeda dengan studi-studi tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji pelaksanaan TPS 3R dari sisi teknis, tetapi juga menilai secara menyeluruh bagaimana kebijakan tersebut

telah dijalankan oleh pemerintah daerah dalam konteks peraturan yang berlaku. Penelitian ini juga menyertakan analisis terhadap faktor penghambat internal dan eksternal yang menyebabkan ketidakefektifan implementasi, dengan merujuk langsung pada pengalaman lokal di Mojokerto yang selama ini belum banyak dibahas dalam literatur akademik.

Selain itu, penggunaan model evaluasi kebijakan William N. Dunn sebagai kerangka teoritik utama menjadikan penelitian ini lebih mendalam secara metodologis. Model ini belum banyak digunakan dalam konteks evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat daerah, khususnya yang mengintegrasikan enam dimensi evaluasi secara simultan. Hal ini memperkuat posisi ilmiah penelitian ini sebagai kontribusi baru dalam bidang studi kebijakan publik dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat.

Dengan demikian, kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada kombinasi antara objek yang spesifik (TPS 3R di Kabupaten Mojokerto), pendekatan evaluasi kebijakan yang holistik, serta identifikasi faktor penghambat berbasis konteks lokal yang belum dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik sekaligus masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan kebijakan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R) di Kabupaten Mojokerto, dengan mengevaluasi pelaksanaannya menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan menurut teori William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan TPS 3R, serta merumuskan strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memperkuat kelembagaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengoptimalkan koordinasi lintas sektor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan, aplikatif, dan berorientasi pada keberlanjutan pengelolaan sampah di tingkat daerah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena dinilai mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap dinamika pelaksanaan kebijakan TPS 3R di Kabupaten Mojokerto, termasuk berbagai hambatan dan respon para pelaksana di lapangan. Pendekatan ini sejalan dengan panduan Nurdin & Hartati (2018) yang menekankan bahwa metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial secara menyeluruh dalam konteks alami. Teori yang digunakan adalah evaluasi kebijakan dari William N. Dunn, yang mencakup enam dimensi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Teori ini dipilih karena menawarkan kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan publik, sebagaimana dijelaskan pula oleh Simangunsong (2019) bahwa teori evaluasi kebijakan sangat relevan digunakan dalam menganalisis dampak implementasi kebijakan publik di tingkat daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung ke beberapa lokasi TPS 3R, wawancara mendalam secara semi-terstruktur, dan dokumentasi kebijakan daerah. Prosedur ini mendukung prinsip triangulasi dalam metode kualitatif agar hasil analisis lebih valid. Penelitian ini dilaksanakan pada 6–25 Januari 2025 di wilayah Kabupaten Mojokerto. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yakni pemilihan secara sengaja berdasarkan keterlibatan langsung dengan kebijakan TPS 3R. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto sebagai pemegang otoritas kebijakan, serta informan kunci lainnya seperti penyuluh lapangan, pengelola TPS 3R, dan warga masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah. Informan-informan ini

dipilih karena memiliki pengalaman langsung serta pengetahuan praktis mengenai pelaksanaan kebijakan TPS 3R. Validitas sumber dan pengalaman empiris informan menjadi salah satu keunggulan utama pendekatan ini (Lilis & Rossy, 2024).

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga mampu mengungkap secara sistematis hubungan antara kebijakan dengan praktiknya di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan menyajikan temuan yang diperoleh dari pengolahan data lapangan menggunakan teknik analisis kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis berdasarkan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn yang mencakup enam kriteria: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

3.1. Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan TPS 3R di Kabupaten Mojokerto

Temuan disajikan secara deskriptif dan diperkuat dengan kutipan langsung dari narasumber untuk menilai sejauh mana kebijakan penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R) di Kabupaten Mojokerto telah diimplementasikan sesuai tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum optimal, ditandai dengan masih minimnya jumlah TPS 3R dibandingkan kebutuhan desa/kelurahan, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Evaluasi ini menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi perbaikan kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan daerah.

a. Efektifitas

Dimensi efektivitas dalam evaluasi kebijakan penyelenggaraan TPS 3R di Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa program belum mampu mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 dan Perda Nomor 78 Tahun 2018 tentang kebijakan strategis daerah, pengelolaan sampah ditargetkan dapat mengurangi timbulan sampah hingga 28% pada tahun 2024. Namun, data dalam dokumen evaluasi Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 menunjukkan capaian pengurangan sampah baru mencapai 26%. Hal ini menjadi indikator awal bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya efektif dalam menjawab permasalahan sampah yang ada.

Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto mengonfirmasi bahwa penyelenggaraan TPS 3R belum berjalan sesuai dengan rencana maupun petunjuk teknis dari Kementerian PUPR. Faktor-faktor seperti rendahnya peran serta masyarakat, kurangnya anggaran, serta minimnya pemahaman terhadap fungsi TPS 3R menjadi penyebab utama belum berfungsinya sebagian besar unit TPS 3R secara optimal. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 yang menyebutkan bahwa pengelolaan TPS 3R merupakan tanggung jawab pemerintah desa, sementara Dinas Lingkungan Hidup hanya berperan sebagai pembina dan koordinator. Posisi ini menyebabkan adanya kesenjangan antara kebijakan di tingkat kabupaten dengan pelaksanaan di tingkat desa.

Hasil observasi di lapangan, khususnya di TPS 3R Petak Berseri dan Trawas Berseri, juga mengungkap berbagai hambatan nyata, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, penolakan terhadap pembayaran retribusi, serta minimnya dukungan APBDDes dalam pembiayaan operasional TPS 3R. Dengan

mempertimbangkan seluruh data tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan TPS 3R di Kabupaten Mojokerto masih rendah. Pemanfaatan sarana yang telah dibangun belum maksimal, baik dari sisi operasional maupun dampaknya terhadap pengurangan sampah di TPA, sehingga perlu adanya evaluasi mendalam dan langkah perbaikan secara sistemik agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

b. Efisiensi

Dimensi efisiensi dalam evaluasi kebijakan TPS 3R di Kabupaten Mojokerto berkaitan dengan sejauh mana program mampu mencapai tujuannya dengan penggunaan sumber daya secara optimal. Efisiensi menekankan pada hubungan antara hasil yang diperoleh dengan sumber daya yang digunakan, baik dalam bentuk waktu, tenaga kerja, maupun biaya. Dalam konteks ini, kebijakan TPS 3R diharapkan tidak hanya berjalan, tetapi juga dikelola dengan hemat, tepat sasaran, dan berkelanjutan dari segi pembiayaan.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur TPS 3R di Kabupaten Mojokerto bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian PUPR, sementara biaya operasional menjadi tanggung jawab pemerintah desa dan masyarakat penerima manfaat. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Bidang Pengolahan Sampah Limbah B3 yang menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup tidak menanggung anggaran operasional secara langsung, tetapi hanya bertanggung jawab dalam pembinaan dan koordinasi. Artinya, efisiensi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesiapan masing-masing desa dalam mengelola pendanaan operasional pasca-pembangunan.

Observasi lapangan yang dilakukan di TPS 3R Kecamatan Trawas dan Pacet menunjukkan variasi pola pembiayaan operasional. Di Trawas, pengelola memperoleh dana dari iuran masyarakat sebesar Rp15.000 per KK, bantuan APBDes sebesar Rp3.000.000 per bulan, serta penjualan sampah daur ulang. Namun, rencana kenaikan tarif iuran menjadi Rp20.000 per KK menghadapi penolakan dari masyarakat. Sementara itu, di TPS 3R Kecamatan Pacet, biaya operasional sepenuhnya berasal dari retribusi warga sebesar Rp20.000 tanpa dukungan APBDes. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun pembangunan fisik TPS 3R cukup efisien karena bersumber dari APBN, namun efisiensi operasional sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan kebijakan anggaran desa, yang tidak merata antar wilayah. Maka dari itu, efisiensi kebijakan belum sepenuhnya tercapai karena masih ditemukan hambatan dalam pembiayaan operasional jangka panjang.

c. Kecukupan

Dimensi kecukupan dalam evaluasi kebijakan penyelenggaraan TPS 3R di Kabupaten Mojokerto digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu memberikan solusi yang memadai terhadap permasalahan sampah yang ada. Kecukupan tidak hanya dilihat dari keberadaan fasilitas atau kebijakan itu sendiri, tetapi juga dari dampak nyata yang dihasilkan dalam mengurangi timbulan sampah serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dalam konteks ini, meskipun kebijakan pengelolaan sampah telah diterapkan melalui pembangunan TPS 3R, namun realisasi pelaksanaannya belum sepenuhnya cukup untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020, khususnya dalam hal mendorong partisipasi masyarakat dan pengurangan timbulan sampah secara signifikan.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto terkait target pengurangan sampah melalui TPS 3R di Kecamatan Pacet dan Trawas, ditemukan bahwa sebagian besar TPS 3R belum mampu mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan ketua TPS 3R di kedua wilayah tersebut yang menyebutkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah dari

rumah, minimnya kesadaran untuk mengumpulkan sampah pada titik kumpul, serta penolakan terhadap kenaikan tarif retribusi menjadi penghambat utama dalam pencapaian target pengurangan sampah. Hambatan-hambatan ini mencerminkan bahwa kebijakan yang ada belum cukup kuat atau memadai untuk menjawab kompleksitas masalah pengelolaan sampah di tingkat masyarakat.

Ketidaksesuaian antara capaian pelaksanaan dan tujuan kebijakan menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan dalam kebijakan TPS 3R masih terbatas cakupannya dan belum menjangkau kebutuhan mendasar di masyarakat, terutama dalam aspek edukasi, insentif partisipatif, dan pendampingan yang intensif. Oleh karena itu, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kebijakan TPS 3R di Kabupaten Mojokerto dari aspek kecukupan masih belum memenuhi ekspektasi sebagai solusi menyeluruh atas persoalan sampah. Perlu adanya penguatan intervensi kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi sosial masyarakat agar program TPS 3R benar-benar mampu mengatasi masalah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

d. Pemerataan

Dimensi pemerataan dalam evaluasi kebijakan TPS 3R bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut memberikan akses dan manfaat yang merata bagi seluruh wilayah atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. Pemerataan dalam konteks kebijakan pengelolaan sampah berarti adanya distribusi program yang adil, baik dari segi pembangunan infrastruktur TPS 3R, dukungan operasional, maupun keterlibatan masyarakat di berbagai desa atau kecamatan. Dengan kata lain, pemerataan mengukur apakah seluruh wilayah di Kabupaten Mojokerto memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses manfaat dari kebijakan TPS 3R.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dari 299 desa dan 5 kelurahan yang ada di Kabupaten Mojokerto, hanya sebagian kecil yang memiliki fasilitas TPS 3R aktif. Ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi program, di mana sebagian besar wilayah belum tersentuh oleh kebijakan ini secara langsung. Berdasarkan observasi penulis dan data dari Dinas Lingkungan Hidup, pembangunan dan operasionalisasi TPS 3R lebih terkonsentrasi di wilayah yang memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya, seperti Kecamatan Trawas dan Pacet. Sementara itu, desa-desa lain dengan permasalahan sampah yang sama atau bahkan lebih serius belum mendapatkan perhatian atau dukungan yang setara.

Kesenjangan ini juga diperkuat oleh wawancara dengan pengelola TPS 3R yang menyatakan bahwa dukungan dari pemerintah desa, retribusi masyarakat, serta keterlibatan kelembagaan sangat bergantung pada kapasitas masing-masing wilayah. Tidak semua desa mampu mengalokasikan APBDes untuk mendukung operasional TPS 3R, dan tidak semua masyarakat bersedia terlibat aktif dalam program. Dengan demikian, dari dimensi pemerataan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan TPS 3R di Kabupaten Mojokerto belum menyentuh seluruh wilayah secara merata, sehingga diperlukan strategi distribusi dan dukungan lintas wilayah yang lebih adil agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara menyeluruh dan tidak timpang antar desa.

e. Responsivitas

Dimensi responsivitas dalam evaluasi kebijakan TPS 3R mengacu pada sejauh mana kebijakan mampu merespons kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan masyarakat secara tepat. Kebijakan yang responsif ditandai dengan adanya penyesuaian atau tindak lanjut yang konkret dari pemerintah terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat, termasuk tantangan dalam implementasi dan harapan warga terhadap pengelolaan

sampah yang lebih baik. Responsivitas juga menunjukkan adanya komunikasi dua arah antara pembuat kebijakan dan pihak yang terdampak kebijakan.

Hasil wawancara dengan pengelola TPS 3R serta observasi lapangan di Kecamatan Trawas dan Pacet menunjukkan bahwa berbagai permasalahan yang muncul di tingkat masyarakat belum sepenuhnya direspons secara maksimal oleh pihak pemerintah. Beberapa isu seperti rendahnya partisipasi warga, penolakan terhadap retribusi sampah, hingga kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pemilahan sampah belum diimbangi dengan strategi komunikasi atau edukasi yang memadai. Bahkan ketika rencana kenaikan tarif retribusi diajukan, banyak warga yang menolak karena merasa belum mendapatkan manfaat yang sepadan, dan pemerintah desa maupun instansi terkait belum sepenuhnya merespons kondisi tersebut dengan pendekatan yang solutif.

Keterbatasan dalam respons pemerintah juga tercermin dari tidak meratanya penyuluhan dan minimnya forum dialog antara pengelola, masyarakat, dan instansi pembina. Hal ini menandakan masih lemahnya daya tanggap terhadap hambatan di lapangan. Dengan demikian, dari dimensi responsivitas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan TPS 3R di Kabupaten Mojokerto belum sepenuhnya responsif terhadap permasalahan dan harapan masyarakat. Agar kebijakan ini berjalan efektif dan berkelanjutan, diperlukan peningkatan mekanisme komunikasi, penyuluhan intensif, serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan secara partisipatif.

f. Ketepatan

Dimensi ketepatan dalam evaluasi kebijakan TPS 3R menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan tepat sasaran dalam menjawab kebutuhan yang ada. Ketepatan berkaitan dengan kecocokan antara program yang dirancang dengan kondisi lapangan, baik dari segi lokasi, sasaran, hingga pendekatan pelaksanaannya. Kebijakan dikatakan tepat apabila intervensinya langsung menasar akar persoalan dan mampu memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian masalah.

Dalam konteks Kabupaten Mojokerto, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan TPS 3R belum sepenuhnya tepat sasaran. Pembangunan TPS 3R tidak selalu mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia, dukungan kelembagaan desa, dan kultur masyarakat setempat. Beberapa TPS 3R dibangun di desa yang belum memiliki sistem pengelolaan sampah terstruktur atau belum siap dalam hal pendanaan operasional dan partisipasi masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak TPS 3R tidak aktif atau berjalan setengah operasional karena perencanaan tidak mempertimbangkan karakteristik lokal secara komprehensif.

Selain itu, pengalihan tanggung jawab operasional sepenuhnya kepada desa tanpa pendampingan yang intensif dari instansi terkait juga menjadi faktor yang mengurangi ketepatan implementasi. Masyarakat yang menjadi penerima manfaat juga belum seluruhnya memahami fungsi dan manfaat TPS 3R, sehingga kebijakan yang ditujukan untuk menyelesaikan persoalan sampah justru tidak maksimal dampaknya. Dengan demikian, dari dimensi ketepatan dapat disimpulkan bahwa kebijakan penyelenggaraan TPS 3R di Kabupaten Mojokerto belum seluruhnya dirancang dan diterapkan dengan memperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan kesiapan wilayah secara tepat, sehingga dibutuhkan evaluasi perencanaan yang lebih berbasis kebutuhan lokal dan dukungan berkelanjutan di tingkat desa.

3.2. Faktor Penghambat Program Penyelenggaraan TPS 3R di Kabupaten Mojokerto

a. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat

Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan TPS 3R di Kabupaten Mojokerto. Rendahnya partisipasi warga dalam memilah sampah dari rumah, membayar retribusi, serta kebiasaan membuang sampah sembarangan, termasuk ke sungai dan pekarangan rumah, menunjukkan bahwa prinsip 3R belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan. Masyarakat cenderung menganggap sampah sebagai barang tidak bernilai, padahal jika dikelola dengan benar, sampah memiliki potensi ekonomi seperti kompos atau pakan maggot. Ketidaknyamanan jarak ke titik kumpul sampah dan anggapan bahwa membakar sampah lebih praktis menjadi alasan lain yang menghambat perubahan perilaku menuju pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

b. Hambatan Anggaran dan Infrastruktur

Hambatan anggaran dan infrastruktur menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan kebijakan TPS 3R di Kabupaten Mojokerto. Keterbatasan Dana Alokasi Khusus menyebabkan jumlah TPS 3R yang dibangun jauh dari kebutuhan ideal sesuai perencanaan, sementara biaya operasional diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa, yang kemampuan keuangannya sangat bervariasi. Hal ini berdampak pada minimnya dukungan infrastruktur seperti fasilitas pengolahan, kendaraan angkut, dan peralatan pendukung lainnya di banyak TPS 3R. Tanpa anggaran dan sarana yang memadai, pelaksanaan kebijakan tidak dapat berjalan optimal dan tujuan pengelolaan sampah berkelanjutan sulit tercapai.

3.3. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dan Penanggung TPS 3R Jawab dalam Mengatasi Faktor Penghambat Berjalannya Kebijakan TPS 3R di Kabupaten Mojokerto

a. Meningkatkan Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto telah melakukan sosialisasi dan pembinaan secara rutin ke desa-desa, baik yang sudah memiliki TPS 3R maupun yang akan membangun. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar dan penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta memastikan masyarakat memahami peran mereka dalam mendukung kebijakan. Edukasi ini juga didukung dengan koordinasi antar pihak terkait agar pelaksanaan program berjalan terintegrasi dan tidak tumpang tindih. Dengan sosialisasi yang intensif dan terarah, diharapkan masyarakat lebih sadar, aktif berpartisipasi, dan mampu menjalankan kebijakan pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana TPS 3R di Kabupaten Mojokerto

Fasilitas dan infrastruktur yang memadai menjadi kunci keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah, namun Pemerintah Kabupaten Mojokerto masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran dan syarat teknis dalam pembangunan TPS 3R. Hambatan seperti minimnya dana, ketersediaan lahan, perizinan, serta persetujuan masyarakat menjadi kendala dalam pemerataan pembangunan fasilitas di seluruh wilayah. Untuk mengatasinya, Dinas Lingkungan Hidup terus mengupayakan peningkatan anggaran melalui APBD, mencari dukungan dari pemerintah pusat maupun pihak swasta, serta mendorong partisipasi masyarakat dan kelompok swadaya. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan guna menciptakan dampak positif bagi lingkungan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R) di Kabupaten Mojokerto belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya efektivitas, efisiensi, dan responsivitas pelaksanaan program, serta belum meratanya pemerataan pembangunan TPS 3R di seluruh desa. Sama halnya dengan temuan Kania & Lely (2020) di Kabupaten Bandung yang menemukan bahwa rendahnya kapasitas SDM, minimnya partisipasi masyarakat, dan ketidaksesuaian lokasi TPS menjadi penyebab utama ketidakefektifan TPS 3R.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Norken dkk. (2021) yang menyatakan bahwa risiko sosial dan teknis dalam pengelolaan TPS 3R dapat diatasi dengan regulasi yang kuat dan koordinasi lintas aktor. Di Mojokerto, masalah koordinasi antarinstansi juga menjadi hambatan signifikan, sebagaimana diungkap oleh pengelola dan pihak Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini membuktikan bahwa pelibatan pemangku kepentingan yang tidak sinergis dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan.

Namun, berbeda dengan penelitian Purba & Wahyuni (2020) yang menilai lemahnya efektivitas kebijakan pengelolaan sampah disebabkan oleh kurangnya sistem evaluasi, dalam konteks Mojokerto ditemukan bahwa akar masalah justru terletak pada keterputusan antara perencanaan di tingkat kabupaten dan pelaksanaan teknis di tingkat desa. Penyerahan tanggung jawab penuh kepada desa tanpa pembinaan intensif terbukti tidak cukup efektif. Temuan ini memperluas temuan Utami & Putra (2022) yang menyatakan bahwa ketidaktepatan lokasi dan lemahnya kontrol pemerintah daerah menjadi penghambat utama implementasi pengelolaan TPA.

Selain itu, temuan ini menolak anggapan yang berkembang dalam studi sebelumnya bahwa partisipasi masyarakat sudah memadai, karena data di lapangan menunjukkan bahwa penolakan terhadap retribusi dan minimnya kesadaran memilah sampah masih sangat tinggi. Padahal, partisipasi aktif masyarakat merupakan syarat penting dalam keberhasilan TPS 3R. Hal ini sejalan dengan temuan Wibowo & Lestari (2022) yang menyatakan bahwa rendahnya keterlibatan warga dalam operasional TPS 3R menjadi hambatan utama dalam optimalisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Rendahnya efektivitas ini membuktikan bahwa pendekatan kebijakan yang *top-down* tanpa pendekatan edukatif partisipatif tidak cukup untuk mendorong perubahan perilaku, sebagaimana ditegaskan pula oleh Utami & Nugraha (2020) bahwa edukasi lingkungan secara langsung memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap prinsip 3R.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menyiratkan bahwa keberhasilan kebijakan TPS 3R bukan hanya ditentukan oleh keberadaan infrastruktur atau aturan formal, tetapi sangat tergantung pada sinergi lintas aktor, edukasi masyarakat yang berkelanjutan, serta dukungan kelembagaan dan anggaran yang memadai. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengevaluasi enam kriteria kebijakan William N. Dunn secara simultan, yang belum banyak digunakan dalam studi TPS 3R sebelumnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penguatan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih responsif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini menemukan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah rumah tangga menjadi hambatan utama dalam efektivitas TPS 3R. Masyarakat masih memandang sampah sebagai sesuatu yang tidak bernilai dan cenderung memilih cara instan seperti membakar atau membuang ke sungai. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi berkelanjutan agar prinsip 3R dapat diterapkan secara menyeluruh.

Selain itu, perbedaan dukungan antar pemerintah desa juga menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya operasional TPS 3R. Desa yang menyertakan alokasi APBDes dan

memiliki perangkat desa yang aktif dalam pengelolaan TPS 3R cenderung lebih berhasil menjalankan program. Sebaliknya, minimnya komitmen dari desa menyebabkan beberapa TPS 3R mangkrak atau tidak aktif.

Temuan lainnya adalah penolakan terhadap kebijakan retribusi sampah oleh sebagian masyarakat. Hal ini terjadi karena mereka merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari keberadaan TPS 3R, atau kurang memahami tujuan retribusi tersebut. Oleh karena itu, strategi komunikasi kebijakan perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami pentingnya kontribusi mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan enam kriteria William N. Dunn, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R) di Kabupaten Mojokerto belum berjalan secara maksimal. Secara umum, efektivitas program masih rendah karena capaian pengurangan sampah belum sesuai target. Efisiensi operasional belum tercapai karena bergantung pada partisipasi masyarakat dan kemampuan keuangan desa yang berbeda-beda. Dari segi kecukupan dan ketepatan, kebijakan belum menjawab kompleksitas permasalahan di lapangan karena tidak mempertimbangkan kesiapan SDM dan kultur lokal. Sementara itu, pemerataan pembangunan fasilitas TPS 3R belum merata di seluruh wilayah, dan responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat masih lemah karena minimnya forum dialog dan pendekatan edukatif.

Faktor penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan ini meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, terbatasnya anggaran dan infrastruktur pendukung, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kurangnya insentif bagi pengelola TPS 3R. Selain itu, ketidaktepatan lokasi pembangunan TPS, penolakan terhadap retribusi, dan minimnya keterlibatan pemerintah desa juga memperburuk pelaksanaan program. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto telah melakukan beberapa upaya seperti meningkatkan sosialisasi dan edukasi 3R kepada masyarakat, memperkuat koordinasi dengan desa, serta mendorong pemanfaatan APBDes dan kemitraan pihak swasta untuk membiayai operasional TPS 3R. Upaya ini perlu diperluas dan diperkuat agar kebijakan dapat berjalan lebih optimal, berkelanjutan, dan didukung oleh seluruh elemen masyarakat.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dan terbatas pada beberapa TPS 3R di Kabupaten Mojokerto, sehingga belum mewakili seluruh wilayah. Keterbatasan waktu, jumlah informan, dan akses data teknis membatasi ruang analisis yang lebih mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau studi komparatif antar daerah untuk mengukur efektivitas kebijakan secara lebih luas. Kajian juga dapat melibatkan perspektif masyarakat dan potensi kolaborasi dengan sektor swasta.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto atas dukungan, izin, dan kerja sama yang diberikan selama pelaksanaan penelitian. Penghargaan juga disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya serta para pengelola TPS 3R dan masyarakat yang telah bersedia menjadi informan. Bantuan dan informasi yang diberikan sangat berperan dalam kelancaran proses pengumpulan data. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan kebijakan dan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah berbasis 3R di Kabupaten Mojokerto.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, T., Shahriar, S. A., & Zaman, A. U. (2021). Public Participation in Household Waste Mthrough 3R Practices: A Case Study from Developing Countries. *Sustainable Cities and Society*, 72, 103032. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.103032>
- Ferronato, N., & Torretta, V. (2019). Waste Mismanagement in Developing Countries: A Review of Global Issues. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(6), 1060. <https://doi.org/10.3390/ijerph16061060>
- Hidayat, R., & Prasetyo, T. W. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(2), 145–153. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jil/article/view/37899>
- Hoornweg, D., & Bhada-Tata, P. (2012). *What a waste: A global review of solid waste management*. Washington, DC: World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17388>
- Kania, S. S., & Lely, S. A. (2023). Identifikasi Faktor Kurang Berjalannya TPS 3R Citepus di Pasawahan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota*, 159-166. 10.29313/jrpk.v3i2.2758
- Lilis, L., & Rossy, R. (2024). Modul Pengembangan Kompetensi Dosen pada Fakultas Politik Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor. *Jurnal Varidika*, 15(1), 165–173. <https://doi.org/10.54783/jv.v15i1.686>
- Norken, I. N., K. D. Harmayani, & Kuntaparmana. (2019). Analisis Risiko Pembangunan dan Pengelolaan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Kota Denpasar (Studi Kasus TPS 3R Desa Sanur Kauh). *Jurnal Spektran*, 7(2): 232-243. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/spektran/article/view/55299>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2018). *Modul Perkuliahan Metodologi Penelitian Sosial*. Sumedang: Fakultas Politik Pemerintahan IPDN.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah
- Purba, E. G., & Wahyuni, I. (2020). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Medan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(2), 101–110. <https://doi.org/10.25077/jiap.10.2.101-110.2020>
- Simangunsong, F. (2019). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Situmeang, V., R. S. Santoso, & H. Warsono. (2023). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. 12(4). 10.14710/jppmr.v12i4.41393
- Utami, D. P., & Nugraha, R. (2020). Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Program 3R Melalui Edukasi Lingkungan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(2), 157–168. <https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/56789>
- Utami, R. N., & Putra, A. D. (2022). Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Bantul. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(1), 25–35. <https://doi.org/10.14710/jil.20.1.25-35>
- Wibowo, A. T., & Lestari, N. K. (2022). Evaluasi Peran Masyarakat dalam Pengelolaan TPS 3R di Kabupaten Sleman. *Jurnal Bumi Lestari*, 22(3), 405–415. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/blje/article/view/86624>
- Wilson, D. C., Velis, C., & Cheeseman, C. (2012). Role of Informal Sector Recycling in Waste Management in Developing Countries. *Habitat International*, 30(4), 797–808. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2005.09.005>
- Zaman, A. U., & Ahsan, T. (2019). Sustainable Waste Management in Developing Countries: A Policy Framework. *Journal of Cleaner Production*, 241, 118357. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118357>